

**MANAJEMEN BUMDES AMANAH DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DESA TANJUNG HARAPAN
KECAMATAN SINGKEP KABUPATEN LINGGA
TAHUN 2022-2024**

Oleh: Muhammad Isra Oktapri

Pembimbing: Rico Purnawandi Pane, M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru,

Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

The Amanah Village-Owned Enterprise (BUMDes) in Tanjung Harapan Village, Singkep District, Lingga Regency, was established as an effort to encourage community empowerment and improve the village economy through the utilization of local potential. However, in its implementation, BUMDes management has not been optimal, characterized by an imbalance between potential and achievement, as well as a decline in performance following the pandemic and changes in management. This study aims to analyze the management of Amanah BUMDes in empowering village communities. The theory used is George Terry's management theory (in Syafii, 2011), which covers four management functions: planning, organizing, implementing, and monitoring. This research approach uses a descriptive qualitative method, with data collection techniques through interviews and documentation of BUMDes management, village government, and the community. The results show that in general, the management of Amanah BUMDes has been running quite well but not optimally. The planning function has been implemented through business programs such as digital printing and ecoprint batik training, but has not yet reached its full potential for tourism. The organization is structured, but lacks strong continuity among management. The implementation of business activities shows high community participation, but consistency of activities has not been maintained due to limited capital and resources. While the supervisory function is being implemented, it is still not optimal and remains administrative in nature. This study recommends strengthening managerial functions and cross-actor collaboration to achieve sustainable community empowerment through the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes).

Keywords: Management, Village-Owned Enterprises, Community Empowerment

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia terus menggencarkan adanya pembangunan nasional guna mewujudkan kemandirian masyarakat yang adil makmur. Pembangunan nasional didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengurus dan mengelola sendiri kepentingan rumah tangganya. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Lahirnya undang-undang tersebut membawa pengaruh besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, salah satunya yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang memberikan ruang bagi BUMDes untuk melakukan ruang usaha sebagaimana yang diatur dalam pasal 87 ayat 3 bahwa BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUMDes didirikan atas dasar kebutuhan masyarakat desa, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa bahwa BUMDes bertujuan melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha,

serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa; melakukan kegiatan pelayanan umum melalui persediaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa; memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa; pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa.

Desa Tanjung Harapan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI), yang saat ini juga mempunyai BUMDes dengan fokus kegiatan usaha yang juga memprioritaskan usaha perekonomian demi mendapatkan keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat. BUMDes Amanah didirikan pada 11 Oktober tahun 2016 sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Desa Tanjung Harapan Nomor 05 tahun 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah.

BUMDes di Desa Tanjung Harapan dikenal dengan nama BUMDes Amanah yang merupakan BUMDes yang berdiri di Kecamatan Singkep dengan sumber permodalan BUMDes Amanah termuat dalam Anggaran Dasar (AD) BUMDes Amanah. Sumber permodalan BUMDes Amanah juga diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes Amanah pada Bab II

tentang permodalan seperti yang termuat pada pasal 6 ayat 1 bahwa BUMDes mendapatkan modal awal untuk melaksanakan kegiatan dari kekayaan desa atau kekayaan desa yang dipisahkan dari anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) dan ayat 2 bahwa “BUMDes dapat memperoleh bantuan permodalan dari APBDes, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.”

Hasil temuan awal menunjukkan bahwa fokus program usaha BUMDes Amanah pada tahun 2022 meliputi penyewaan kios, penyewaan molen dan kegiatan *digital printing*. Kegiatan *digital printing* menjadi fokus usaha dari BUMDes Amanah, dengan tiga kegiatan utama yaitu *Digital Cutting Sticker*, Sablon DTF (*Direct Transfer Film*), dan Penjualan Pakaian/Kaos/*Jacket*. Pengembangan dana usaha BUMDes dikelola dengan membangun sistem usaha terpadu dan membangun sumber daya manusia melalui pengembangan unit usaha.

Pengelolaan BUMDes Amanah di Desa Tanjung Harapan dilakukan secara terpisah dari struktur pemerintahan desa, meskipun pengurusnya ditetapkan melalui peraturan desa. Pengelolaan BUMDes menuntut idealisme tinggi, kolaborasi antara pemerintah desa, pengurus, dan masyarakat, serta penyusunan perencanaan bersama. Pengurus BUMDes wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang diawasi oleh pengawas internal dan eksternal seperti Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Kantor Akuntan Publik (KAP).

Desa Tanjung Harapan memiliki potensi wisata pantai yang belum optimal dimanfaatkan oleh BUMDes, padahal pengembangan potensi ini bisa mendongkrak PAdes yang selama ini masih rendah. Wilayah BUMDes Amanah meliputi Pasir Kuning, Sergang Laut, dan Kampung Telek, dengan potensi ekonomi seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan. Dukungan masyarakat membuat BUMDes Amanah mendapat penghargaan terbaik tingkat Provinsi Kepri pada 2022.

Sayangnya, pada 2023–2024, BUMDes sempat vakum karena kekurangan modal dan pergantian pengurus, yang berdampak pada terhentinya unit usaha unggulan seperti *digital printing*. Hal ini mengakibatkan kerugian lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Kegiatan usaha yang dijalankan pun tidak lagi mampu menghasilkan laba atau penghargaan.

Melihat kondisi tersebut, penelitian ini tertarik meninjau aspek manajemen BUMDes Amanah dalam upaya pemberdayaan masyarakat, mengingat pentingnya peran manajemen dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk keberhasilan pengelolaan BUMDes.

B. Kerangka Teori Manajemen

Kata manajemen bersumber dari bahasa Inggris yaitu “*manage*” yang berarti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin (Yusuf et al., 2023: 20). Menurut Frederick W. Taylor dalam (Syafie, 2011: 1-2) mengatakan bahwa

manajemen sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri yang sebenarnya akan anda kerjakan selanjutnya mengkaji apakah sesuatu itu dikerjakan dengan cara terbaik serta termudah. Sedangkan menurut George Terry dalam (Syafiie, 2011: 1-2) disebutkan bahwa manajemen adalah suatu proses khusus yang berdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.

Selanjutnya menurut Mary Parker Follett dalam Sadikin et al., (2020: 2) manajemen merupakan seni dalam mencapai tujuan melalui orang lain. Kemudian menurut James A.F. Stoner (Sadikin et al., 2020: 3) manajemen ialah proses perencanaan, organisasi, kepemimpinan dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan semua sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Definisi ini mengandung arti bahwa manajemen merupakan suatu kesatuan yang dimulai dari perencanaan hingga pengawasan terhadap penggunaan semua sumber daya untuk mencapai tujuan dari organisasi

Fungsi Manajemen

Menurut Yusuf et al., (2023: 26) fungsi manajemen merupakan, elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen, yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Secara umum, fungsi manajemen merupakan aktivitas

Menurut George Terry (dalam Yusuf et al., 2023) secara umum terdapat 4 Fungsi manajemen yang dikenal di masyarakat yang sering disingkat dengan *POAC* (*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*), yaitu sebagai berikut:

1. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan merupakan fungsi pertama dari fungsi manajemen. Secara umum, perencanaan (*planning*) dapat diartikan suatu proses dalam menentukan sesuatu yang ingin dicapai yaitu, tujuan di masa yang akan datang serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dapat juga dimaknai perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber daya yang dimiliki.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan fungsi kedua dari fungsi manajemen. Pengorganisasian (*organizing*) dapat diartikan sebagai proses kegiatan dalam menyusun organisasi sesuai dengan tujuan, sumber daya, dan lingkungannya. Pengorganisasian (*organizing*) dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil.

3. *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan fungsi ketiga dari fungsi manajemen. Pelaksanaan (*actuating*) adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Pelaksanaan adalah proses penggerakan orang-orang untuk melakukan kegiatan pencapaian tujuan sehingga terwujud efisiensi proses dan efektivitas hasil kerja.

4. *Controlling* (Pengendalian)

Pengendalian merupakan fungsi terakhir dari fungsi manajemen. Pengendalian adalah suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Pengendalian merupakan suatu proses pengamatan terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan organisasi atau perusahaan untuk menjamin agar kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, atau proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang dihadapi.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sumberdaya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi, dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Pemberdayaan masyarakat adalah sebagai upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya untuk menguatkan kelembagaan masyarakat agar mereka memiliki kemampuan dalam mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.

Menurut Britha, Mikkelsen dalam (Afriansyah et al., 2023) pemberdayaan masyarakat adalah sekumpulan praktek dan kegiatan yang diungkapkan dalam bentuk simbol simbol. Simbol simbol

tersebut kemudian mengomunikasikan kekuatan yang tangguh untuk untuk mengubah hal hal yang terkandung dalam diri kita (inner space), orang orang lain yang dianggap penting serta masyarakat kita.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam manajemen BUMDes Amanah dalam pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial dari perspektif para pelaku langsung di lapangan, serta memperoleh data deskriptif berupa kata-kata dan tindakan yang diamati. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, yang dipilih karena potensinya dalam pengembangan ekonomi desa melalui keberadaan BUMDes Amanah.

Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan seperti pengurus BUMDes, kepala desa, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip, buku, dan sumber lain yang mendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dan dokumentasi, guna memperoleh informasi yang akurat dan relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas

data, digunakan teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil dari proses ini diolah secara sistematis dan disajikan dalam bentuk narasi untuk menggambarkan secara komprehensif pengelolaan BUMDes Amanah serta dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen BUMDes amanah dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, dengan menggunakan fungsi manajemen menurut yang terdiri dari Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengawasan. Berikut uraian empat fungsi manajemen tersebut

A. Perencanaan

Perencanaan manajemen BUMDes Amanah merupakan strategi untuk mengelola potensi desa secara profesional dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah desa, melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga. Fokus utama diarahkan pada pengembangan usaha yang sesuai dengan potensi lokal seperti pertanian, perikanan, dan pengelolaan limbah organik

Berkaitan dengan perencanaan, Bapak Irwansyah selaku Kepala Desa Tanjung Harapan mengatakan bahwa:

“Kepengurusan BUMDes sekarang lebih memanfaatkan potensi desa, seperti usaha papan bunga dan pupuk kompos dari limbah rumah tangga. Selain itu, ada juga usaha sabun cuci piring meski pemasarannya masih terbatas karena

belum ada izin Dinkes” (Wawancara pada tanggal 21 April 2025)

Hasil dari wawancara tentang perencanaan BUMDes Amanah menunjukkan bahwa saat ini tengah berada dalam masa pengembangan kembali setelah sebelumnya sempat terhenti akibat kepengurusan yang lama. Beberapa jenis usaha yang saat ini dijalankan meliputi:

1. Penyewaan kios dan istana balon:
2. Produksi papan bunga bekerja sama dengan instansi lokal
3. Rumah kompos sebagai upaya mengelola sampah dan mengurangi polusi.
4. Produksi sabun cuci piring yang masih dijual terbatas di desa

Kepengurusan saat ini mengedepankan keberlanjutan, ekonomi sirkular, dan keterlibatan masyarakat secara langsung, terutama ibu-ibu rumah tangga sebagai target pasar pupuk kompos. Sementara itu, Bapak Wendy Febrian, S.Tr selaku Direktur BUMDes Amanah pada periode 2020-2023 mengatakan bahwa:

“Kita prioritaskan usaha yang punya nilai ekonomis bagi masyarakat, seperti kuliner dan penyewaan kios. Nilai sewanya sangat rendah agar masyarakat tempatan bisa mudah berjualan.” (Wawancara pada tanggal 28 April 2025)

Pada periode sebelumnya, BUMDes lebih menitikberatkan pada pengembangan usaha yang menunjang ekonomi lokal, seperti warung dan kios, yang disewakan dengan harga terjangkau untuk mendorong usaha masyarakat kecil. Strategi ini menempatkan warga lokal sebagai pelaku utama dalam menghidupkan roda ekonomi desa.

Dalam konteks perencanaan jangka ke depan, Bapak Nopiansyah S.Pd.I, Direktur periode 2024–2029 mengungkapkan adanya perubahan arah kebijakan nasional, bahwa:

“Mulai 2025, kita harus fokus pada ketahanan pangan, tidak bisa lagi membuat usaha yang beragam. Misalnya, bisa direncanakan usaha ternak ayam pedaging dengan perputaran cepat” (Wawancara, 30 April 2025)

BUMDes Amanah telah melakukan upaya untuk mengembangkan usaha yang mendukung ketahanan pangan, salah satunya adalah beternak ayam pedaging yang memiliki siklus perputaran modal yang cepat. Kebijakan ini juga mewajibkan pengalokasian minimal 20 persen dari dana desa untuk sektor ketahanan pangan. Hasil temuan ini mencerminkan bahwa dinamika perencanaan BUMDes Amanah yang mengupayakan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah, sembari tetap menempatkan masyarakat sebagai pusat dari setiap rencana pembangunan yang menitikberatkan pada kelanjutan dan penguatan program-program yang sudah ada, khususnya yang mendukung ketahanan pangan masyarakat desa.

B. Pengorganisasian

Pengorganisasian manajemen BUMDes Amanah di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, merupakan elemen strategis dalam upaya peningkatan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat desa. Dengan pengorganisasian yang baik, BUMDes mampu berperan sebagai motor penggerak ekonomi lokal,

menjembatani potensi sumber daya desa dengan kebutuhan pasar, sekaligus membuka peluang kerja dan usaha bagi masyarakat.

Struktur organisasi yang jelas menjadi pondasi utama dalam pengelolaan manajemen BUMDes. Di Desa Tanjung Harapan, struktur ini dibentuk dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk pemuda dan perempuan. Setiap posisi dalam kepengurusan memiliki tugas dan fungsi (tupoksi) yang spesifik dan saling melengkapi. Menurut Wendy Febrian, S.Tr, Direktur BUMDes periode 2020–2023:

“Dalam pembagian kerja itu sesuai dengan tupoksinya, bagaimana direktornya untuk membuat program, bagaimana bendaharanya dalam pengelolaan keuangan juga sekretarisnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan desa. Jadi sesuai tupoksilah.” (Wawancara, 28 April 2025)

Hasil temuan tersebut, menunjukkan bahwa direktur bertanggung jawab dalam menyusun program strategis, kemudian bendahara fokus pada pengelolaan keuangan secara tertib, sementara sekretaris berfungsi sebagai penghubung antara BUMDes, masyarakat, dan pemerintah desa.

Struktur yang terorganisasi dengan baik ini menciptakan alur kerja yang efisien dan akuntabel. Tidak hanya memperjelas siapa mengerjakan apa, tapi juga meningkatkan koordinasi internal serta kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes sebagai lembaga desa yang kredibel. Lebih dari sekadar struktur, pengorganisasian

juga mencakup pelibatan aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan BUMDes. Salah seorang warga desa menyampaikan bahwa:

“Saya merasa program BUMDes Amanah sangat bermanfaat bagi kesejahteraan kami karena melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, usaha bersama, dan penyediaan lapangan kerja, masyarakat desa menjadi lebih berdaya... Saya cukup sering terlibat, terutama dalam kegiatan pelatihan dan pertemuan warga yang diadakan oleh BUMDes setiap triwulan...” (Wawancara, 28 April 2025)

Hasil temuan tersebut menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan bagian integral dari pengorganisasian. Program seperti pelatihan keterampilan, usaha bersama, dan pertemuan triwulanan menjadi wadah warga untuk belajar, berdiskusi, dan turut serta menyusun arah pembangunan desa. Hasilnya, masyarakat merasa lebih memahami potensi lokal dan termotivasi untuk terlibat aktif dalam pembangunan desa.

Dalam pengorganisasian, BUMDes Amanah juga terbuka terhadap kerja sama dengan pihak eksternal untuk memperluas jaringan dan meningkatkan kapasitas. Namun demikian, upaya kolaborasi ini tidak selalu berjalan mulus. Seperti disampaikan oleh Bapak Wendy Febrian, S.Tr yang mengungkapkan bahwa

“Keterlibatan pihak luar, contoh kita coba jaringan internet tetapi belum terealisasi karena memang dulu karena kesiapan desa kita sendiri. Untuk hubungan kerja sama sudah pernah dibuat bukti-bukti

dokumentasi ini ada. Tidak ada terhambat karena anggaran tetapi memang utuh waktu yang panjang...” (Wawancara, 28 April 2025)

Hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pengorganisasian eksternal memang telah diinisiasi, misalnya dengan mengupayakan akses internet sebagai pendukung kegiatan usaha. Namun realisasinya terhambat bukan karena dana, melainkan karena kesiapan teknis dan koordinasi internal desa yang belum optimal. Dokumentasi kerja sama telah disusun sebagai bentuk komitmen, dan keberlanjutannya kini bergantung pada kepemimpinan baru. Harapannya, kerja sama yang sudah dirintis tidak berhenti, melainkan dikembangkan dengan perencanaan yang lebih matang.

Pengorganisasian juga mencakup aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. BUMDes Amanah secara rutin menyusun laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat dan pemerintah desa. Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan bahwa seluruh dana benar-benar digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Dampak dari pengorganisasian yang baik terlihat pada meningkatnya solidaritas sosial dan ekonomi warga. Ketika struktur organisasi berjalan fungsional, masyarakat dilibatkan aktif, dan keterbukaan informasi dijaga, maka kepercayaan dan partisipasi masyarakat pun meningkat. Ini memberi efek ganda: program-program pemberdayaan menjadi lebih tepat sasaran, dan

masyarakat menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

Secara keseluruhan, pengorganisasian manajemen BUMDes Amanah tidak hanya menjadi alat administratif, tetapi juga instrumen pemberdayaan. Dengan struktur yang inklusif, pelibatan masyarakat yang intensif, serta sinergi dengan pihak luar, BUMDes mampu menjadi kekuatan penggerak pembangunan desa yang berkelanjutan. Tantangannya ke depan adalah bagaimana menjaga kesinambungan program dan memastikan bahwa setiap inisiatif yang telah dirintis terus dikembangkan demi kemandirian ekonomi masyarakat desa.

C. Pelaksanaan

Pelaksanaan BUMDes Amanah di Desa Tanjung Harapan dimulai dengan perencanaan kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa. Musyawarah desa dilakukan sebagai langkah awal untuk menentukan jenis usaha yang akan dikembangkan berdasarkan potensi lokal yang tersedia. Dengan pendekatan ini, BUMDes berupaya memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Peran masyarakat dalam proses perencanaan juga menjadi bentuk pemberdayaan karena mereka turut andil dalam menentukan arah pembangunan ekonomi desa. Hasil dari perencanaan tersebut menjadi dasar kuat dalam pengelolaan unit usaha BUMDes.

Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan usaha dilakukan melalui pengembangan beberapa unit usaha yang relevan dengan kondisi dan

potensi desa. Di antaranya adalah usaha simpan pinjam, penyediaan barang kebutuhan pokok, dan pengelolaan hasil laut. Unit usaha ini tidak hanya bertujuan menghasilkan keuntungan bagi desa, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi warga setempat. Dengan demikian, BUMDes Amanah menjadi motor penggerak perekonomian desa yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat. Keberadaan unit-unit usaha tersebut juga mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program, BUMDes Amanah juga menyelenggarakan berbagai pelatihan bagi masyarakat. Pelatihan ini meliputi pelatihan *ecoprint*, keterampilan usaha, dan kewirausahaan. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk mengelola usaha sendiri atau terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi desa. Pelatihan ini menjadi bentuk nyata pemberdayaan masyarakat karena memberikan peluang peningkatan kapasitas dan kemandirian. Hal ini juga mendorong lahirnya pelaku-pelaku usaha baru di tingkat desa.

Pelaksanaan BUMDes Amanah juga memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan operasional. Setiap kegiatan usaha dilaporkan secara rutin kepada pemerintah desa dan masyarakat melalui forum desa. Dengan sistem pelaporan yang terbuka, masyarakat dapat memantau perkembangan usaha dan memberikan masukan untuk perbaikan. Evaluasi juga dilakukan secara berkala untuk

mengukur efektivitas kegiatan dan menyesuaikan strategi pelaksanaan sesuai dinamika kebutuhan desa. Hal ini penting agar kegiatan BUMDes tetap relevan dan mampu menjawab tantangan pembangunan desa.

Secara keseluruhan, pelaksanaan BUMDes Amanah di Desa Tanjung Harapan telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang berperan aktif dalam mengelola dan memanfaatkan potensi desa. Melalui kegiatan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan, BUMDes menjadi sarana penting dalam mewujudkan kemandirian desa. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan manajemen yang baik, BUMDes mampu menjadi solusi konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, pelaksanaan BUMDes perlu terus dikembangkan dan diperkuat untuk mencapai pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan pelaksanaan, Bapak Wendy Febrian, S.Tr selaku Direktur BUMDes Amanah pada periode 2020-2023 mengatakan bahwa:

“kalau kendala tetap kita BUMDes Amanah ini disemua BUMDes mungkin di Kabupaten Lingga terkait masalah anggaran, karena kita tidak ada penyertaan modal yang besar. kendalanya itu, jadi bisnis bisa berjalan karena ada support modal yang besar. Itu yang menjadi kendalanya. cara mengatasinya itu kita memang harus bekerja sama bentuknya macam investasi dengan pihak ketiga, nah di

tempat kita juga pihak-pihak ketiga itu tidak semua yang siap dan punya kemampuan untuk bermitra, intinya begitu”(Wawancara pada 28 April 2025)

Dari hasil wawancara tersebut, Informan menyatakan bahwa BUMDes Amanah, seperti halnya banyak BUMDes lainnya di Kabupaten Lingga, menghadapi permasalahan utama dalam hal pendanaan. Keterbatasan anggaran menjadi penghambat utama dalam menjalankan roda usaha secara maksimal. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya penyertaan modal yang besar dari pemerintah desa atau lembaga pendukung lainnya. Padahal, dukungan modal sangat krusial untuk menunjang kegiatan operasional dan pengembangan usaha BUMDes.

Modal yang cukup menjadi syarat penting agar sebuah bisnis dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Tanpa suntikan modal yang memadai, berbagai rencana usaha hanya akan berhenti pada tahap perencanaan. Ini menjadi tantangan besar bagi BUMDes Amanah yang memiliki potensi untuk berkembang, namun terhambat oleh kekurangan dana yang seharusnya menjadi fondasi awal dalam menjalankan usaha desa.

Sebagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut, BUMDes Amanah mencoba mencari solusi alternatif melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Bentuk kerja sama ini diarahkan pada pola investasi yang diharapkan dapat memberikan tambahan modal untuk menjalankan usaha. Model kemitraan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menutupi kekurangan modal yang

tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah desa.

Namun demikian, pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga juga tidak berjalan mulus. Tidak semua calon mitra memiliki kesiapan, komitmen, atau kemampuan finansial untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi BUMDes Amanah dalam mencari mitra yang benar-benar bisa diajak bekerja sama secara profesional dan berkelanjutan. Oleh karena itu, meskipun kemitraan merupakan solusi potensial, realisasinya memerlukan proses seleksi dan pendekatan yang hati-hati.

Lalu hasil wawancara dengan Bapak Nopiansyah S.Pd.i sejak 2024-2029 mengatakan bahwa:

“dalam menjalankan program BUMDes Amanah ini usahanya itu terkendala dana anggaran, karena kami kemarin sisa anggaran dari pengurus lama itu sekitar 8 juta itulah kami kelola, Alhamdulillah lah usaha papan bunga ini bisa berjalan gitu dan bisa gaji orang. dan tahun 2025 ini kami mengusulkan lagi untuk penyertaan modal untuk nambah usaha lagi di luar daripada dana ketahanan pangan tadi”(Wawancara pada 21 April 2025)

Dari hasil wawancara tersebut, Dalam menjalankan program BUMDes Amanah, pihak pengelola menghadapi kendala utama dalam hal pendanaan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran yang tersedia untuk mengembangkan usaha. Ketika pengurus baru mulai bekerja, dana yang dimiliki hanyalah sisa anggaran

dari pengurus sebelumnya yang berjumlah sekitar Rp8 juta.

Dengan anggaran yang sangat terbatas tersebut, pengurus BUMDes berusaha untuk tetap menjalankan program yang sudah direncanakan. Dana sebesar Rp8 juta itu kemudian dikelola dengan hati-hati dan digunakan untuk memulai sebuah usaha baru, yaitu usaha papan bunga. Meskipun modal awal tidak besar, mereka tetap berupaya agar usaha tersebut bisa berjalan dan memberikan hasil.

Usaha papan bunga yang dijalankan tersebut ternyata membuahkan hasil yang cukup menggembirakan. Berkat pengelolaan yang baik, usaha ini tidak hanya dapat berjalan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Salah satu pencapaian yang dianggap penting adalah bahwa usaha ini sudah mampu menggaji tenaga kerja, sehingga membuka lapangan pekerjaan di tingkat lokal.

Melihat keberhasilan awal dari usaha papan bunga, pengurus BUMDes Amanah kemudian menyusun rencana untuk pengembangan usaha lebih lanjut. Pada tahun 2025, mereka berencana mengajukan usulan penyertaan modal kembali. Tujuannya adalah untuk menambah jenis usaha yang dijalankan BUMDes, di luar dari program yang terkait dengan dana ketahanan pangan. Hal ini menunjukkan komitmen BUMDes dalam memperluas kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Lalu wawancara dengan Bapak Wendy Febrian, S.Tr selaku Direktur

BUMDes Amanah pada periode 2020-2023 mengatakan bahwa:

“keberlangsungannya, jika keberlangsungannya terus sampai sekarang berarti itu berlangsung dengan baik gitu. salah satunya contoh dari segi penyewaan kiosnya kita nilai sewanya beda jauh untuk memudahkan masyarakat tadi tidak pernah putus. Berartikan keberlangsungannya bagus untuk masyarakat setempat”

Dari wawancara tersebut, dalam keberlangsungan program yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi indikator utama keberhasilannya dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. Jika suatu program masih berjalan hingga saat ini tanpa terputus, hal itu menunjukkan bahwa pelaksanaan program tersebut berlangsung dengan baik dan berkelanjutan. Konsistensi dalam menjalankan kegiatan usaha menjadi salah satu tanda bahwa BUMDes dikelola secara efektif dan mampu memenuhi kebutuhan warga desa.

Salah satu contoh nyata dari keberlangsungan program BUMDes adalah dalam hal penyewaan kios. BUMDes menetapkan tarif sewa yang terjangkau dan berbeda jauh dari harga pasaran pada umumnya, dengan tujuan memudahkan masyarakat dalam mengakses tempat usaha. Kebijakan ini sangat membantu warga, khususnya pelaku usaha kecil, untuk mendapatkan ruang usaha tanpa terbebani biaya tinggi. Dengan strategi ini, kios-kios yang disediakan tetap terisi dan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

Fakta bahwa program penyewaan kios tersebut tidak pernah

mengalami putus atau penghentian membuktikan bahwa keberlangsungannya benar-benar terjaga. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen BUMDes dalam menjalankan perannya sebagai motor penggerak ekonomi desa. Program yang berjalan secara konsisten seperti ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes sebagai lembaga usaha yang berpihak kepada kepentingan warga setempat.

Wawancara dengan Bapak Wendy Febrian, S.Tr selaku Direktur BUMDes Amanah pada periode 2020-2023 mengatakan bahwa:

“kalau monitoring kita biasanya dalam rapat-rapat sama desa per triwulan. dan dalam rapat triwulan kita evaluasi baik itu aliran dan BUMDes itu sendiri ataupun terkait program-program yang harus di benah itu biasanya per triwulan, sifatnya kita rapat dengan desa, BPD, perangkat desa lah, dan masyarakat karena juga BUMDes dimonitoring juga oleh masyarakat”

Dari hasil wawancara tersebut, Monitoring terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan secara berkala melalui rapat-rapat yang diselenggarakan setiap triwulan. Dalam rapat tersebut, pihak-pihak terkait seperti pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, dan masyarakat turut hadir untuk mengevaluasi kinerja BUMDes. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari aliran dana hingga pelaksanaan program-program usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

Pelaksanaan rapat triwulan ini menjadi momen penting untuk mengidentifikasi kendala dan memperbaiki program-program yang belum berjalan optimal. Setiap pihak diberi kesempatan untuk memberikan masukan dan saran perbaikan. Hal ini menunjukkan adanya kolaborasi yang baik antar lembaga desa dalam mengawasi dan mengarahkan BUMDes agar tetap berada pada jalur yang sesuai dengan visi pembangunan desa.

Monitoring tidak hanya dilakukan oleh perangkat resmi desa, tetapi juga melibatkan masyarakat secara aktif. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan ini menunjukkan transparansi dan akuntabilitas BUMDes terhadap publik. Masyarakat dapat memberikan masukan langsung berdasarkan pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan program-program BUMDes.

Dengan mekanisme monitoring yang bersifat partisipatif dan dilakukan secara rutin, BUMDes dapat terus berkembang dan memperbaiki diri. Evaluasi triwulan ini menjadi sarana untuk mengukur keberhasilan program, menyesuaikan strategi usaha, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes. Hal ini menjadi kunci penting dalam mewujudkan pengelolaan BUMDes yang profesional dan berkelanjutan.

D. Pengawasan

Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah di Desa Tanjung Harapan memiliki peran penting dalam memastikan setiap kegiatan usaha berjalan sesuai dengan tujuan awal, yaitu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengawasan yang efektif, BUMDes Amanah dapat mempertahankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan program-programnya. Hal ini juga mendorong kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes sebagai lembaga yang mampu membawa perubahan positif bagi desa.

Dalam praktiknya, pengawasan dilakukan oleh berbagai pihak seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, serta tokoh masyarakat. Mereka turut aktif memantau kegiatan usaha BUMDes agar tetap berada dalam jalur yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga. Mekanisme pengawasan ini mencakup evaluasi berkala, laporan keuangan terbuka, dan forum musyawarah desa yang membahas kinerja BUMDes secara rutin. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan juga menjadi bentuk demokratisasi ekonomi desa.

BUMDes Amanah telah mengelola beberapa unit usaha yang berkontribusi terhadap perekonomian lokal, seperti simpan pinjam, pengelolaan hasil pertanian, dan distribusi barang kebutuhan pokok. Pengawasan yang baik memastikan unit-unit usaha tersebut berjalan efisien dan memberikan manfaat langsung bagi warga, terutama dalam hal peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja. Dengan begitu, pemberdayaan masyarakat dapat tercapai melalui keterlibatan mereka sebagai pelaku usaha dan penerima manfaat.

Selain itu, pengawasan yang ketat juga mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan

dana desa yang dikelola oleh BUMDes. Ketika pengelolaan usaha dilakukan dengan jujur dan profesional, hasil yang diperoleh dapat dialokasikan kembali untuk program-program pembangunan dan pelatihan masyarakat. Misalnya, pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha yang diberikan kepada warga, terutama generasi muda, menjadi langkah nyata dalam menciptakan masyarakat desa yang mandiri dan produktif.

Secara keseluruhan, pengawasan terhadap BUMDes Amanah menjadi fondasi utama dalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung Harapan. Dengan pengawasan yang terstruktur dan partisipatif, BUMDes mampu berkembang secara berkelanjutan dan menjadi motor penggerak ekonomi desa. Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga pengawas yang terus berkomitmen membangun desa dari, oleh, dan untuk warganya.

Berkaitan dengan pengawasan, Bapak Norman Syahril selaku sebagai BPD di desa Tanjung Harapan mengatakan bahwa:

“Sekarang dalam struktur organisasi kami tak termasuk lagi, maksudnya dia tetap ada dalam pengawasan. Karena dalam struktur organisasi ini BPD berperan mengawasi kinerja Kepala Desa, BUMDes ini masih wilayah desa BPD mengawasi secara di luar saja dia tidak masuk dari struktur organisasi. Jadi BPD mengawasi pelaporan dari penyertaan modal untuk bumdes setidaknya dia harus di acc lewat kepala desa dan BPD dan juga kami tau tujuan dana-dana

yang di pakai, kami memperhatikan dari situ. Lalu mengkomunikasikan saling sharing BPD, Kepala Desa, dengan Direktur BUMDes apa yang perlu dijalankan dan dibutuhkan BUMDes”(Wawancara pada 21 April 2025)

Dari hasil wawancara tersebut Saat ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak lagi menjadi bagian langsung dari struktur organisasi BUMDes. Namun demikian, BPD tetap memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya BUMDes. Hal ini dikarenakan BUMDes masih berada dalam lingkup kewenangan desa, sehingga pengawasan oleh BPD tetap berjalan meskipun tidak terlibat secara struktural di dalam tubuh organisasi BUMDes.

Pengawasan yang dilakukan BPD lebih bersifat eksternal, khususnya dalam hal pelaporan penggunaan dana desa yang disalurkan sebagai penyertaan modal ke BUMDes. BPD memastikan bahwa setiap alokasi dana yang digunakan oleh BUMDes telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa dan juga diketahui oleh BPD. Dengan begitu, BPD dapat memahami dan memantau tujuan serta arah penggunaan dana tersebut agar tetap sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Selain itu, pengawasan yang dilakukan BPD juga mencakup aspek komunikasi dan koordinasi. BPD secara rutin melakukan sharing informasi dan diskusi bersama Kepala Desa dan Direktur BUMDes terkait rencana kerja serta kebutuhan operasional BUMDes. Kolaborasi ini penting agar setiap program atau kegiatan BUMDes dapat dijalankan

secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan adanya peran pengawasan yang dilakukan BPD, meskipun tidak masuk dalam struktur organisasi BUMDes, tercipta hubungan kerja yang saling melengkapi antara lembaga desa. Peran pengawasan eksternal ini membantu menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta mendukung pengembangan BUMDes sebagai salah satu pilar ekonomi desa.

Lalu wawancara dengan Ibu Sri Rezeki S. Sos selaku Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa mengatakan bahwa:

“DPMD mengontrol bagaimana mereka menjalankan BUMDes itu, bagaimana maju atau tidaknya berjalannya suatu BUMDes. perkembangannya bagaimana bisa modalnya didapat keluar masuknya. Apakah bisa menutup atau tidak dengan modal segitu untuk kedepannya lagi. Dan juga masih butuh pembinaan yang lebih dari DPMD untuk anggota BUMDes yang sekiranya masih kurang pemahamannya dan pengetahuannya tentang mengelola usaha agar terkelola dan berjalan dengan baik”(Wawancara pada 24 Februari 2025)

Dari hasil wawancara tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengontrol jalannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). DPMD memastikan bahwa setiap BUMDes menjalankan usahanya sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini mencakup pemantauan terhadap aktivitas usaha, laporan keuangan,

serta kesesuaian pelaksanaan program dengan kebutuhan masyarakat desa.

Salah satu fokus utama DPMD adalah menilai sejauh mana BUMDes mengalami kemajuan dalam pengelolaan usahanya. Hal ini terlihat dari perkembangan unit usaha yang dikelola, stabilitas keuangan, serta kemampuan BUMDes dalam mengelola keluar-masuknya modal. DPMD juga mempertimbangkan apakah modal yang tersedia mampu menopang kelangsungan usaha untuk jangka panjang atau justru berisiko mengalami kerugian.

Dari hasil pengawasan tersebut, DPMD dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi BUMDes, termasuk tantangan dalam pengelolaan modal dan efisiensi operasional. Jika sebuah BUMDes tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan, maka DPMD berperan memberikan evaluasi dan rekomendasi agar arah kebijakan usaha dapat diperbaiki. Hal ini penting untuk mencegah BUMDes mengalami stagnasi atau bahkan kerugian.

Selain pengawasan, DPMD juga diharapkan memberikan pembinaan lanjutan kepada pengurus dan anggota BUMDes. Banyak pengelola BUMDes yang masih kurang memahami prinsip-prinsip dasar dalam mengelola usaha, seperti perencanaan bisnis, pencatatan keuangan, dan pemasaran produk. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan teknis sangat dibutuhkan agar BUMDes dapat berjalan secara profesional dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, keberadaan DPMD sebagai pembina dan pengawas BUMDes sangat krusial dalam menciptakan tata kelola usaha desa yang baik. Dengan pengawasan yang ketat serta pembinaan yang berkelanjutan, BUMDes dapat tumbuh sebagai lembaga ekonomi desa yang mandiri dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Wawancara dengan Bapak Wendy Febrian, S.Tr selaku Direktur BUMDes Amanah pada periode 2020-2023 mengatakan bahwa:

“Keterlibatan terhadap pengawasan masyarakat kepada BUMDes, ya dulunya keterlibatan masyarakat intinya support, masyarakat support yang kita bikin kemarin makanya dalam apapun kegiatan BUMDes yang kita lakukan contohnya ecoprint, masyarakat terlibat langsung dalam beberapa program yang kita wacanakan itu masyarakat terlibat langsung” (Wawancara pada 28 April 2025)

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan hal yang penting dan telah terjadi sejak awal pembentukan BUMDes. Pada awalnya, bentuk keterlibatan masyarakat lebih kepada dukungan moral dan sosial terhadap program-program yang dirancang oleh BUMDes. Dukungan ini menjadi pondasi yang kuat bagi BUMDes dalam membangun kepercayaan dan menjalin hubungan yang baik dengan warga desa.

Dukungan masyarakat tersebut bukan hanya bersifat pasif, tetapi juga aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh BUMDes. Masyarakat ikut mendorong dan

menerima berbagai program yang dijalankan, karena mereka merasa memiliki dan menjadi bagian dari pembangunan ekonomi desa. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes mendapat legitimasi sosial dari masyarakat sekitar.

Salah satu contoh konkret keterlibatan masyarakat adalah dalam program ecoprint, di mana warga turut ambil bagian secara langsung. Program ini tidak hanya menjadi sarana pemberdayaan ekonomi, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Kehadiran masyarakat dalam program tersebut memperkuat semangat gotong royong dan rasa memiliki terhadap BUMDes.

Secara keseluruhan, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan program BUMDes tidak hanya membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat keberhasilan setiap kegiatan. Dengan partisipasi aktif masyarakat, BUMDes tidak hanya menjadi lembaga usaha milik desa, tetapi juga cerminan semangat kolektif masyarakat dalam membangun kesejahteraan bersama.

Lalu Wawancara dengan ibu Sri Rezeki S. Sos selaku Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa mengatakan bahwa:

“pelatihan ada, Kadang-kadang dari BPKP ada, dari provinsi ada, untuk baru-baru ini belum ada. Pelatihan dilakukan oleh dinas dilakukan terakhir 2023,tidak dilakukan rutin dikarenakan efisiensi biaya” (Wawancara pada 24 Februari 2025)

Pelatihan bagi pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memang pernah dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Beberapa pelatihan tersebut diselenggarakan oleh berbagai pihak, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta pemerintah provinsi. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali pengelola BUMDes dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha desa secara profesional.

Namun, dalam pelaksanaannya, pelatihan tersebut tidak dilakukan secara rutin. Salah satu alasan utamanya adalah keterbatasan anggaran, sehingga efisiensi biaya menjadi pertimbangan penting. Akibatnya, jadwal pelatihan tidak bisa dijadwalkan secara berkala dan berkelanjutan, melainkan tergantung pada ketersediaan dana dan inisiatif dari instansi terkait.

Terakhir kali pelatihan dilakukan oleh dinas terkait adalah pada tahun 2023. Sejak saat itu, belum ada pelatihan lanjutan yang diberikan kepada pengelola BUMDes. Kondisi ini tentu berdampak pada perkembangan kapasitas pengurus, terutama dalam menghadapi tantangan baru dalam pengelolaan usaha, perencanaan bisnis, serta pelaporan keuangan yang akuntabel.

Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah dan instansi pembina untuk kembali mengaktifkan program pelatihan secara rutin. Dengan pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan pengelola BUMDes dapat meningkatkan kemampuan

manajerialnya dan menjalankan usaha desa secara efektif, sehingga manfaat BUMDes benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwasanya Manajemen BUMDes Amanah dalam meningkatkan pemberdayaan di Desa Tanjung Harapan sudah baik namun belum optimal. Ini bila dilihat dari Perencanaan yang mencakup penyusunan program kerja serta identifikasi potensi usaha desa seperti digital printing, penyewaan kios, pelatihan ecoprint, dan rumah kompos untuk masyarakat. Namun, rencana strategis jangka panjang belum sepenuhnya dimatangkan, khususnya dalam pengembangan sektor wisata desa yang potensinya belum tergarap maksimal. Hambatan utama dalam aspek ini adalah keterbatasan dana dan perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan kurangnya keberlanjutan dan sistematika dalam perencanaan jangka panjang.

Dalam aspek pengorganisasian, struktur kerja BUMDes sudah terbentuk dengan baik, ditandai dengan pembagian tugas yang jelas dan pemisahan dari struktur pemerintahan desa guna menjaga independensi. Namun, efektivitas pelaksanaan organisasi belum optimal karena kurangnya kesinambungan antar kepengurusan, lemahnya koordinasi internal, serta minimnya pembinaan kepada pengurus baru. Akibatnya, beberapa program usaha stagnan dan tidak berkembang sesuai harapan. Oleh karena itu, dibutuhkan

pengorganisasian yang lebih solid, terarah, dan berkesinambungan untuk mendukung peningkatan kinerja BUMDes secara menyeluruh.

Pelaksanaan kegiatan usaha seperti pelatihan batik ecoprint, penyewaan kios, dan digital printing sudah berjalan dengan melibatkan masyarakat. Namun, keterbatasan modal serta kurangnya kesinambungan usaha setelah pandemi dan pergantian pengurus menjadi hambatan signifikan. Beberapa unit usaha bahkan mengalami penurunan performa hingga kerugian. Pengawasan juga masih terbatas pada aspek administratif dan belum dilakukan secara rutin maupun menyeluruh, sehingga evaluasi terhadap kesalahan manajerial kurang maksimal. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas pelaksanaan serta penguatan sistem pengawasan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan sangat diperlukan agar BUMDes Amanah dapat lebih optimal dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa.

B. Saran

BUMDes Amanah perlu meningkatkan kapasitas pengurus dan anggota melalui pelatihan manajemen, kewirausahaan, dan pemasaran digital agar mampu menghadapi tantangan usaha dan memperluas pasar produk lokal.

Penguatan kerja sama dengan pihak eksternal, seperti lembaga pelatihan, mitra usaha, dan pemerintah daerah, diperlukan untuk memperluas akses pengetahuan, modal, dan jaringan distribusi produk.

Pengelolaan keuangan dan pelaporan harus terus dijaga transparansinya, dengan melibatkan

masyarakat dalam proses evaluasi dan pengawasan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap BUMDes.

BUMDes disarankan untuk segera mengurus perizinan usaha baru, sehingga produk dapat dipasarkan lebih luas dan memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dewi, I. K., & Mashar, A. (2019). *Nilai-Nilai Profetik dalam Kepemimpinan Modern Pada Manajemen Kinerja*. Yogyakarta, CV. Gre Publishing.
- Hadi, S. P. (2016). *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta, GMU Press.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Bogor, Ghalia Indonesia.
- Priansa, D. J., & Garnida, A. (2013). *Manajemen Perkantoran*. Alfabeta. Bandung.
- Sadikin, A., Misra, I., & Hudin, M. S. (2020). *Pengantar Manajemen dan Bisnis*. Yogyakarta, Penerbit K-Media.
- Syafiie, I. K. (2011). *Manajemen Pemerintahan*. Bandung, Pustaka Reka Cipta.
- Wibowo, S. (2019). *Pengantar Manajemen Bisnis*. Bandung, Telkom Poolteching.
- Yusuf, Haryoto, C., Husainah, N., & Nuraeni. (2023). *Teori Manajemen*. Tangerang, Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal:

Aryawati Widya Budi, P., Hariani, D., & Rina, A. H. (2023). Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Upaya Memulihkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Era New Normal (Studi Kasus BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten). *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(3), 1–15.

Anggi Febryany, Herijanto Bekt, Slamet Usman Ismanto (2023). Manajemen Badan Usaha Milik Desa Mitra Maju Sejahtera Desa Gunung Putri Kabupaten Bogor. *Jurnal JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 14(2), 581-592

Kholik, A. (2020). Perencanaan dan Manajemen Komunikasi dalam Membangun Citra Pelayanan Jasa *Outsourcing*. *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*,

8(1), 95–103. <http://journal.unj.ac.id/>

Mulda, R., Nurhayati, & Sari, M. E. P. (2020). Manajemen Pemerintahan Desa: Studi Kasus Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mekkatta, Kabupaten Majene. *Jurnal Trias Politika*, 4(2), 214–228. <https://doi.org/10.33373/jtp.v4i2.2788>

Aldi Muhammad Rizki, Evi Priyanti, Gun Gun Gumilar, Kariena Febriantini (2023). Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Cibadak Kecamatan

Rawamerta Kabupaten Karawang. *Jurnal DIMENSI*, 12(1) 177-185

Suryadi, A., Rusli, B., & Alexandri, M. B. (2021). Impelementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *Responsive*, 4(1), 29.

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari APBN (PP Dana Desa)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badang Usaha Miliki Desa

Peraturan Daerah Kabuaten Lingga Nomor 3 tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Desa Tanjung Harapan Nomor 05 tahun 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah.